

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM  
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**FITRIANI**

**NPM : 1521020122**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM  
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**FITRIANI**

**NPM : 1521020122**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2019M**

## ABSTRAK

Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian Presiden secara tidak normal. Terdapat dua Presiden Republik Indonesia (Soekarno dan Abdurrahman Wahid) yang diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada 23 Juli 2001, MPR-RI mengadakan sidang istimewa sehingga mengesahkan TAP MPR-RI nomor II/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR-RI karena beliau dianggap telah melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara. Faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan posisi Presiden tersebut adalah karena UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat secara eksplisit tentang pemazuklan Presiden. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat pasal mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang diatur dalam pasal 7A.

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni Bagaimanakah *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia? serta Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui *impeachment* presiden dalam hukum tata negara Indonesia dan pandangan fiqh siyasah mengenai *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitaian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dan pandangan fiqh siyasah terhadap *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, melalui fungsi pengawasan, DPR mengawasi kerja presiden dan mempunyai hak untuk mengusulkan *impeachment* seorang Presiden bila dalam masa jabatannya Presiden melakukan satu atau serangkaian pelanggaran yang termaktub dalam Pasal 7A UUD 1945. *Kedua*, dalam Fiqh Siyasah, pembahasan mengenai *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah memiliki kesamaan yakni terkait lembaga yang berwenang untuk meng-impech presiden dan memakzulkan kepala negara adalah lembaga legislatif. Dalam Hukum Tata Negara Islam tidak ada penjelasan mengenai terlibatnya lembaga peradilan dalam proses pemakzulan sehingga MK sebagai lembaga hukum yang terlibat dalam mekanisme *impeachment* presiden di Indonesia merupakan hal yang baru dalam ketatanegaraan Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment  
Dalam Hukum Tata Negara Indonesia**

**Nama : Fitriani  
NPM : 1521020122**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 195512251985031002**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.  
NIP. 195812071987031003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” disusun oleh, Fitriani, NPM: 1521020122, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Jum’at, 1 November 2019.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr.H.A. Kumedi Ja’far, S.Ag.,MH. (.....)**

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradita, M.H.I (.....)**

**Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)**

**Penguji Pendamping I: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji Pendamping II: Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)**

**Dekan**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

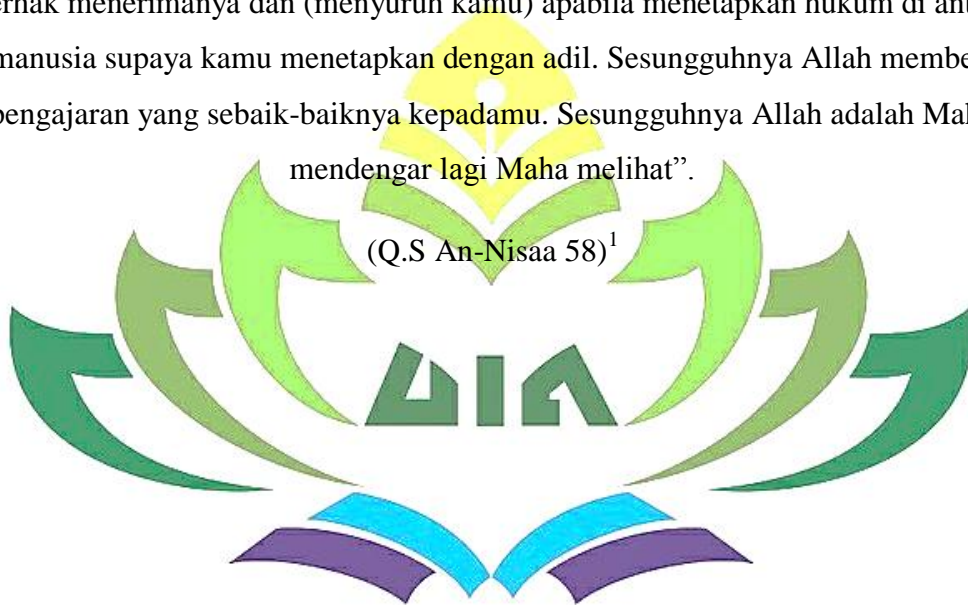
## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisaa 58)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Sigma ExsaMedia Arkanleema, 2009), h. 87

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kakek dan Nenek tercinta, Caca dan Sukaesih, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan cucu yang kalian sayangi.
2. Ibu tersayang, Jeni Al pira, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pun dapat membalas perjuanganmu tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuanganmu.
3. Adik-adikku tercinta, Erli Lestari, Aditya Saputra, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.

6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.





## RIWAYAT HIDUP

**Fitriani**, lahir pada tanggal 14 Februari 1997 di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anak tunggal dari pasangan Bapak Rudyanto dan Ibu Jeni Al Pira. Beralamat di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Negeri Jemanten pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Marga Tiga pada tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota OSIS.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Sekampung pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis menjadi anggota OSIS dan aktif menjadi pengurus ROHIS (Rohani Islam).
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyash.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2015, khusus Siyasah E: Tiara Virginia, Rizki Amelia, Anggraini, Ria Dwi Afrida, Rima Sinfalina, Yunnita, S.H, Repi Susanti, S.H, Elisa, Nadiyah, Ice, Mayang, Habib, Andre, Billi, Yedi, Khomsi Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari, Fauzi yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Teman seperjuangan semasa kuliah Rima Sinfalina Gosa yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 05-09-2019

Fitriani  
1521020122



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. .Penegasan Judul ..	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II IMPEACHMENT DALAM FIQH SIYASAH</b>	
A. Hak dan Kewajiban Pemimpin.....	14
B. Dasar Hukum dan Alasan Pemakzulan .....	21
C. Akibat Hukum Pemakzulan .....	26

D. Pandangan Para Pemikir Siyasah Tentang Pemakzulan .....	30
--	----

### **BAB III IMPEACHMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA**

#### **INDONESIA**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Impeachment.....	36
B. Syarat dan Prosedur Impeachment .....	39
C. Lembaga Pelaksana Impeachment .....	57
D. Akibat Hukum Impeachment .....	62

### **BAB IV ANALISIS**

A. Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia .....	66
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diuraikan, antara lain:

Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>2</sup>

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>3</sup>

*Impeachment* yaitu pendakwaan terhadap seseorang untuk turun dari jabatannya sebagai pejabat negara. Pendakwaan tersebut harus sesuai dengan proses yang terdapat dalam konstitusi setiap negara. Pendakwaan biasanya dilakukan untuk presiden ataupun perdana menteri yang sudah tidak lagi mampu menjalankan aturan negara serta melakukan hal-hal yang dapat mempermalukan negara.<sup>4</sup>

Presiden yaitu seorang pemimpin atau kepala negara bagi negara yang berbentuk republik.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

<sup>3</sup> Shobir Thoimah, *Dirotsatu Fi Nidhomih Islam* (Beirut: Dar Al-Ajil), h. 178.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 87.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.370.



Hukum Tata Negara Indonesia. Berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan hukum, lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam hal ini terkait dengan ketatanegaraan Islam.<sup>6</sup>

Dari penjelasan beberapa istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu studi analisis tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment dalam hukum tata negara Indonesia.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia” yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Dalam konteks sejarah Indonesia, telah terjadi dua kali pemberhentian presiden sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu pada kasus mantan presiden Soekarno dan mantan presiden Abdurrahman Wahid. Banyak pihak menilai proses pemberhentian keduanya inkonstitusional dan hanya dipengaruhi oleh kekuatan politik semata tanpa ada proses hukum yang dilalui, tentunya hal ini cukup mengusik penulis yang hingga saat ini masih meyakini dengan teguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga seluruh proses ketatanegaraan terutama yang termasuk kejadian luar biasa seperti pemakzulan presiden

---

<sup>6</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia-Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

haruslah diatur secara jelas oleh konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam mekanisme ketatanegaraan.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan pada umumnya terbagi atas dua sistem utama, yaitu sistem presidensiil dan sistem parlementer. Di luar dari kedua sistem tersebut dinamakan sistem “campuran”, dapat pula berbentuk kuasi presidensiil atau kuasi parlementer. Namun, ada juga yang menyebut sistem referendum, yaitu sistem yang badan eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif, atau yang biasanya disebut sebagai badan pekerja legislatif. Dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol yang dilakukan terhadap badan legislatif dilakukan secara langsung melalui referendum.<sup>7</sup>

Secara teoritis, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil sangat kuat dibandingkan dengan kedudukan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer. Hal itu wajar, karena dalam sistem presidensial dimaksudkan dan diharapkan untuk melahirkan suatu

---

<sup>7</sup> Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni* (Malang: Setara Press Kelompok Penerbit In-Trans, 2012), h. 46.

pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu (*fix term office periode*). Presiden hanya dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi setiap negara. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, Kepala Pemerintahan atau Perdana Menteri yang memimpin kabinet setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.<sup>8</sup> Hak dan kewajiban negara adalah hak dan kewajiban dari individu yang menurut kriteria harus dianggap sebagai organ negara, yaitu yang menjalankan fungsi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Fungsi tersebut dapat berupa isi dari hak dan kewajiban, juga merupakan isi dari suatu kewajiban jika seorang individu dapat dikenai suatu sanksi seandainya fungsi tersebut tidak dijalankan.

Menurut pengertian hukum nasional, tidak ada delik yang dapat dituduhkan kepada negara, namun demikian negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat tindakannya yang tidak memenuhi kewajiban. Artinya bahwa suatu organ negara diwajibkan untuk membatalkan tindakan *illegal* yang dilakukan oleh seorang individu yang sebagai organ negara, telah diwajibkan untuk menghukum individu ini, dan untuk mengganti kerugian yang disebabkan secara melawan hukum dari harta kekayaan negara.<sup>9</sup>

Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian presiden secara tidak normal. Terdapat dua dari empat presiden Republik Indonesia (Soekarno dan Abdurrahman Wahid) yang diberhentikan dari jabatannya

---

<sup>8</sup>Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta:Konstitusi Press, 2014), h. 1.

<sup>9</sup> Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 285-286.



sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara, setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya TAP MPRS-RI Nomor XXXIII/MPRS/1967. Kemudian pada 23 Juli 2001, MPR-RI mengadakan sidang istimewa sehingga mengesahkan TAP MPR-RI nomor II/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR-RI karena beliau dianggap telah melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara.<sup>10</sup> Faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan posisi presiden tersebut adalah karena UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat secara eksplisit tentang pemazuklan presiden.

Satu-satunya ketentuan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, yang secara jelas mengatur kemungkinan pemakzulan Presiden adalah Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan:

“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Kemudian penjelasan UUD 1945 angka VII alinea ketiga sebelum amandemen terhadap Pasal 8 tersebut, menyatakan :

“Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.”

---

<sup>10</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden ....*, h. 2.

Lebih lanjut lagi mengenai ketentuan pelaksanaan sidang istimewa ini diatur dalam TAP MPR nomor III tahun 1978 *Jo.* TAP MPR nomor VII tahun 1973. Alasan tentang pemakzulan presiden tercantum dalam ketentuan tersebut, yang berbunyi “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau oleh MPR.”

Aturan materil dalam UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, adalah pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (lama), yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Penegasan di dalam Pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan mantan presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto pernah mengatakan, bahwa seseorang dapat menjabat sebagai presiden berulang kali dan sangatlah bergantung pada MPR. Jadi tidak perlu dibatasi, asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden. Dan Almarhum Soehartolah orang yang telah menikmati kebebasan jabatan itu karena beliau sendiri yang membuat tafsir atas UUD 1945, MPR tinggal mengamininya.<sup>11</sup>

Kemudian, pada pasal 7 setelah amandemen bunyinya menjadi:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

---

<sup>11</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005), h.. 186.

Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan dan pentafsiran yang luas tentang periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>12</sup> Setelah amandemen UUD 1945, terdapat pasal mengenai alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya yang diatur dalam pasal 7A, berbunyi sebagai berikut:

”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”<sup>13</sup>

Menurut Al-Baqillani, kepala negara atau *khalifah*, yang dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka *khalifah* tersebut dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara.<sup>14</sup> Pendapat yang hampir sama dipaparkan oleh Al-Mawardi, bahwa *khalifah* yang memimpin suatu negara, tetapi cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara, melakukan perbuatan munkar, serta perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak boleh lagi menduduki

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Pertama, bab III, pasal 7.

<sup>13</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Ketiga, bab III, pasal 7A.

<sup>14</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 77.



jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lain yang memiliki kekuatan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai representasi dari rakyat harus memilih kembali khalifah yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas negara.<sup>16</sup> *Ahlul halli wal aqdi* selain mengangkat imam atau khalifah, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>17</sup>

Maka dari itu, jika *ahlul halli wal aqdi* dapat membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan khalifah untuk kemaslahatan ummat. Meskipun ada kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum Islam, namun di dalam Al-Qur'an Allah SWT. telah memberikan manusia ruang untuk dapat bermusyawarah menyelesaikan permasalahan dunia yang semakin hari semakin maju. Pada masa *Khulafa al-Rasyidin*, terjadi 2 kali pemberhentian khalifah secara tidak normal karena pemberontakan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Khalifah Usman Ibn Affan yang wafat karena dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah, dan Basrah.

Hal tersebut terjadi karena Khalifah Usman Ibn Affan dituduh telah melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi

---

<sup>15</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Edisi I (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 262-263.

<sup>16</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2003), h. 76.

gubernur. Serta dianggap telah melakukan korupsi dengan menggunakan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Pembunuhan oleh Abd al-Rahman bin Muljam terhadap khalifah Ali Ibn Thalib yang terjadi pada saat beliau menuju mesjid untuk mengimami sholat subuh disebabkan karena kaum *Khawarij* yang tidak setuju dengan *tahkim* (arbitrase) yang dilakukan Muawiyah Ibn Sufyan untuk berdamai.<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut nampak bahwa terdapat aturan mengenai *impeachment* presiden dalam hukum tata negara Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 dengan pemakzulan kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, proses pemberhentian kepala negara di sistem pemerintahan Islam tidak diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ijtihad para ulama-lah yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti tinjauan fiqh siyasah terhadap *impeachment* presiden dalam hukum tata negara Indonesia.

#### **E. Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang merupakan inti permasalahan tersebut akan dikaji secara teoritis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia?

---

<sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan ....*, h. 157-158.

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap *impeachment* dalam hukum tata negara Indonesia?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang impeachment presiden dalam hukum tata negara Indonesia
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap impeachment dalam hukum tata negara Indonesia.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- 1) Kegunaan secara teoritis yaitu memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para pembaca tentang impeachment presiden dalam sistem hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu Pengetahuan Hukum Konstitusi dan Hukum Islam (khususnya Fiqh Siyasah).

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dan para wakil rakyat di DPR dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

- 2) Untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>19</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan diambil dari bahan hukum primer. Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

---

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.



- a. Bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, Al- Qur'an, Hadist, UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang yang terkait, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, kitab-kitab Fiqh Siyasah, buku-buku tata negara, buku-buku HAM, buku Fiqh siyasah dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel.

### 4. Metode Pengolahan Data

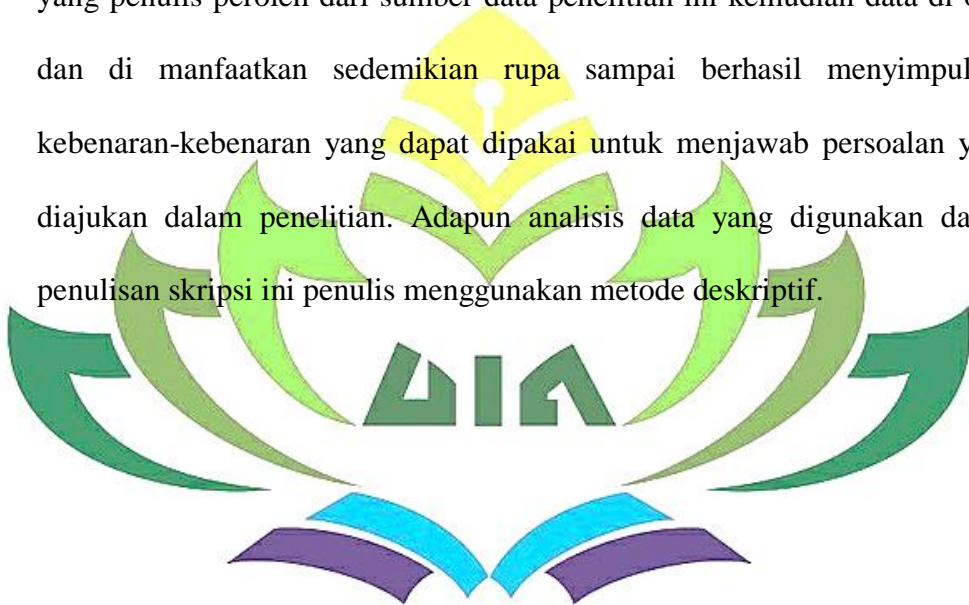
Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 5. Metode Analisa Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini kemudian data di olah dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif.



## BAB II

### IMPEACHMENT DALAM FIQH SIYASAH

#### A. Hak dan Kewajiban Pemimpin

##### 1. Hak-Hak Pemimpin

Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai Kepala Negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang Kepala Negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan.<sup>21</sup> Maka, dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Maududi, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), h. 275.

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah. 2000), h. 26.

a. Ketaatan kepada pemimpin

Suatu negara tercipta karena dukungan dan kesetiaan (*mubaya'ah*) dari *ahli al-syawkah*, dan setelah itu berkat pengaruh *ahli al-syawkah* itu seluruh masyarakat menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara. Sumpah setia ini memaksakan kepatuhan sebagai kewajiban utama kepada warga negara. Sumpah setia ini adalah sebuah ikrar untuk menaati kepala negara selama perintah-perintahnya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Nabi Muhammad. Sumpah setia (*bay'ah*) ini mempunyai dua aspek.

Di dalam aspeknya yang *pertama* sumpah setia itu merupakan perjanjian di antara seorang Muslim dengan Allah di mana ia secara mutlak, total, dan tanpa syarat menaati Allah. Di dalam aspeknya yang *kedua*, sumpah setia itu adalah perjanjian di antara seorang Muslim dengan pejabat administratif Muslim di dalam masyarakat. Aspek kedua ini sudah seharusnya berlandaskan aspek yang pertama, yaitu bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama tidak menyebabkan keingkaran (*ma'shiyah*) kepada Allah.<sup>23</sup>

Selama ini argumentasi dasar yang menjadi landasan keharusan patuh kepada kepala negara berdasarkan sumber dari al-Quran (surat an-Nisa ayat 59). Sumber normatif tersebut sering kali digunakan sebagai argumentasi ketaatan kepada Kepala Negara secara total dan teguh tanpa menghiraukan apa pun yang dilakukan oleh penguasa.

Namun dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Menurutnya,

---

<sup>23</sup>Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka. 1983), h. 278.



ketaatan itu harus disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan bernegara secara gotong royong. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan politis yang pada dasarnya merupakan ketaatan yang bersifat kritis, masyarakat tidak pernah kehilangan hak mengeluarkan pendapat mereka dengan adanya ketaatan tersebut.<sup>24</sup>

Adapun mengenai kepala negara yang zalim atau fasik, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan, satu sisi tetap mempertahankan ketaatan sepenuhnya, sisi yang lainnya adalah pilihan untuk tidak taat kepada penguasa yang zalim. Ibnu Taimiyah salah satunya yang berpendapat, bahwa mengingkari Imam (kepala negara) hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang tegas di dalam al-Quran atau Sunnah.<sup>25</sup>

Ibnu Taimiyah juga membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan, menurutnya, kita boleh mengingkari seorang kepala negara dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya, selama ia masih melakukan shalat.<sup>26</sup> Lebih jauhnya lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat mengiring pada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan di kalangan masyarakat.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 280

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 285.

Oleh sebab itu, jika dipastikan bahwa perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, situasi yang dianggapnya tak terhindarkan dalam situasi dengan pemimpin yang didukung kelompok yang berkuasa, maka umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang memulai suatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.<sup>27</sup>

b. Biaya hidup untuk pemimpin

Menurut Yusuf Musa, seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.<sup>28</sup> Pandangan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sah mengenai apa yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khatthab. Semasa menjabat khalifah, Abu Bakar memperoleh belanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara (*baitul mal*).<sup>29</sup>

Begitu pula ketika Umar menjabat khalifah, atas usulan Ali ibn Abi Thalib, memperoleh biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya. Dasar dari pemberlakuan prinsip ini oleh kaum Muslimin, adalah agar seorang Kepala Negara (khalifah) dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dan menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi), h..

<sup>29</sup> *Ibid.*

pencarian nafkah hidup, sehingga dengan penuh konsentrasi ia dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemulian dan kebesaran umat.<sup>30</sup>

## 2. Kewajiban Pemimpin

Menurut al-Mawardi, pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan Syari'at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab khalifah bertugas mengurus urusan-urusan agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan kepemimpinan (*imamah*) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan kepemimpinan (*imamah*) tersebut. Akal hanya menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan bukan pemutusan hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi. Namun syari'at menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan (*imamah*) harus diserahkan kepada aturan Allah SWT. Karena Kepala Negara (khalifah) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>31</sup> Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai "Pengganti Rasul", memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara.<sup>32</sup>

Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meli-puti:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ...., h..1-2.

<sup>32</sup> *Ibid.*

terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwah hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahl dzimmah*), agar hak Allah teralisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.



- g. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau jihad tanpa rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat.<sup>33</sup>

Dalam pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban Kepala Negara, Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan al-Mawardi yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban kepala negara yang menjadi landasan pandangannya. Dari sepuluh kewajiban kepala negara al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban yang disebut al-Mawardi dapat disimpulkan mejadi dua bagian utama yang menjadi kewajiban bagi seorang Kepala Negara. Kedua kewajiban tersebut adalah:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 3-5.

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia.
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah (masyarakat) baik ke dalam maupun ke luar.<sup>34</sup>

## **B. Dasar Hukum dan Alasan Pemakzulan**

Pemakzulan dalam Islam dapat diartikan didalam pengertian *al-khalla'* (pencopotan) yaitu mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Manzur mengatakan, kata mencopotnya sama pengertiannya dengan mencabutnya, hanya saja dalam istilah pemecatan terkandung makna penangguhan atau proses secara perlahan. Jadi istilah pencopotan erat kaitannya dengan pelanggaran. Istilah pelanggaran dan pemecatan terkandung pengertian tipu daya muslihat. Didalam syara' atau hukum istilah tersebut tidak diperkenankan.<sup>35</sup>

Rasulullah SAW sangat menekankan sebuah kepemimpinan yang baik, sebuah kepemimpinan bila tidak menjamin dan melindungi rakyatnya serta tidak menjadikan rakyatnya sejahtera, maka kepemimpinan itu bisa dikatakan buruk. Pemimpin yang buruk ini disamakan dengan mereka yang suka menipu, pelit, dan suka mengungkit kebbaikannya/pemberiannya sendiri.

Khalifah atau Kepala Negara sebagai pemimpin harus dapat menjadi panutan dan mencontohkan sikap yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal demikian wajar karena sebagai pemimpin telah lolos dari syarat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>35</sup> Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 191-192.

dan ketentuan untuk menjadi Khalifah atau Kepala Negara telah disepakati bahwa untuk menjadi pemimpin negara mempunyai syarat yaitu adil, memiliki kemampuan untuk berijtihad untuk dapat menyelesaikan kasus, semua panca inderanya sehat dan baik, semua organ tubuhnya sehat dan baik, memiliki ide dan gagasan yang mumpuni untuk dapat membangun negara, serta yang terakhir yaitu memiliki sikap keberanian untuk menjaga kedaulatan negara dan hukum syara'.<sup>36</sup>

Jika seseorang menduduki kepemimpinan negara Islam tidak berarti bahwa ia tetap akan menjadi Kepala Negara tanpa ada yang boleh mengganggu gugat, apapun yang terjadi, dan apapun yang ia lakukan meskipun bertentangan dengan syariat Islam. Khalifah secara otomatis akan diberhentikan manakala terjadi perubahan keadaan didalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkan dari jabatan Khalifah.

Para Yuris Muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi ('adalah) yang rusak dan cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikannya Kepala Negara. Alasan lain berhentinya seorang Khalifah adalah karena meninggal dunia, penunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila.<sup>37</sup> Abdul Qadim Zallum membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah:

1. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan Khalifah dari jabatannya, yaitu terdiri dari:

---

<sup>36</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ...., h. 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*

a. Kalau Khalifah Murtad atau keluar dari Islam.<sup>38</sup> Apabila imam keluar agama Islam riddah, seperti jika ia secara terus terang mengeluarkan kata-kata kufur atau mengingkari salah satu prinsip agama Islam, atau mendustakan Al-Qur'an atau menafsirkan ayat Al-Qur'an menurut seleranya sendiri dan bertentangan dengan maksud yang disepakati, atau melakukan perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekufuran maka dengan sendirinya keabsahan imamah-nya telah gugur. Karena Islam merupakan salah satu syarat pengangkatan khalifah. Bahkan ini merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa menjadi khalifah. Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka wajib dibunuh kalau dia tidak kembali kemurtadannya. Karena orang kafir itu tidak boleh menjadi penguasa atas kaum muslimin. Demikian orang kafir tidak diperbolehkan untuk memiliki jalan untuk menguasai orang-orang mukmin.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ  
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  
فَاللَّهُ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*"(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut*

---

<sup>38</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2007), h. 275.

berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisa : 141)".<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59)".<sup>40</sup>

Maka kata *minkum* (dari kamu sekalian) bersamaan dengan kata *ulil amri* tersebut merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syariat Islam bagi seorang waliul amri, selama ia masih menjadi waliul amri. Kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin). Dengan demikian sifat yang disyaratkan oleh Al-Qur'an bagi seorang waliul amri, yaitu harus Islam itu telah hilang. Karena itu, khalifah akan dikeluarkan dari jabatannya karena kemurtadannya dan dia tidak akan kembali menjadi khalifah kaum muslim sehingga hukum mentaatinya tidak wajib.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 101.

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 87.

<sup>41</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 173-174.



b. Kalau Khalifah gila total (parah) yang tidak bisa di sembuhkan atau hilang akal. Apabila imam kehilangan akal atau terganggu mentalnya sehingga membuatnya gila dalam waktu pendek atau lama maka imam dalam hal ini keluar dari imamah dan berhak diberhentikan. Hal itu memang karena memang akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khalifah, disamping hal itu juga merupakan syarat keberlangsungan akad (*syurut istimrar*). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Telah diangkat pena itu atas tiga orang yaitu, atas anak kecil hingga iya dewasa (baligh), atas orang tidur hingga ia bangun, dan atas orang gila hingga ia sembuh”.

c. Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas. Karena dengan begitu, dia tidak mampu untuk memberikan instruksi secara penuh, baik berupa perintah maupun larangan, dalam urusan-urusan kaum muslim, sehingga statusnya seperti tidak ada.<sup>42</sup>

2. Perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan khalifah namun tidak boleh mempertahankan jabatannya yaitu terdiri dari:

a. Khalifah telah kehilangan ‘adalah-nya, yaitu telah melakukan kefasikan terang-terangan. Hal ini karena memang ‘adalah merupakan salah satu syarat keberlangsungan akad pengangkatan khalifah. Karena ketika Allah swt. telah mensyaratkan ‘adalah (adil) pada saksi, maka syarat tersebut

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

justro lebih utama bagi keberlangsungan akad pengangkatan jabatan khalifah.<sup>43</sup>

- b. Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria. Hal itu karena salah satu syarat akad pengangkatan jabatan khalifah, bahkan menjadi syarat keberlangsungan akadnya adalah laki-laki. Karena adanya sabda Rasulullah saw.
- c. Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila.
- d. Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai Khalifah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak lagi dapat diharapkan kesembuhannya.
- e. Adanya tekanan yang menyebabkan Khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara'.<sup>44</sup>

### C. Akibat Hukum Pemakzulan

Mengenai Pemakzulan dalam Islam tidak ditemukan penjelasan secara eksplit dan meyakinkan. Namun dalam kita-kitab *fiqh al-siyasah* setidaknya ditemukan beberapa cara atau pemberhentian Khalifah. *Pertama*, sekelompok ulama Ahli Sunnah, Khawarji, Mu'tazilah, Zaidiyah, dan para ulama murjiah berpendapat wajib mengangkat senjata untuk memberhentikannya. Cara inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan menghunuskan pedang. Golongan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 176-177.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 178.

Khawarij berpendapat, Imam yang telah berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka ia wajib dipecat atau dibunuh.<sup>45</sup>

Abu Hanifah mendukung pendapat ini. Ia mengatakan bahwa keimanan seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebih dari itu, dibolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan seyogyanya hal itu dilakukan dengan syarat pemberontakan itu memiliki faktor-faktor untuk dapat berhasil dan berfaedah dengan seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim dan fasik, dan bukan semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan nyawa.

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syari'at. Pendapat ini mendapat dukungan dari *fuqaha* lainnya seperti Sa'id bin Jubair, al-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, dan Abdul Bukhturi. Ibnu Hazm mengemukakan bahwa sebagian besar Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Khawarji, dan Zaidiyah memandang bahwa mengangkat senjata dalam amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib jika mencegah kemungkaran itu tidak ada jalan lain selain dengan senjata.<sup>46</sup>

Secara umum Ahlusunnah melihat pada dua pertimbangan:

*Pertama*, akibat negatif menggunakan kekuatan senjata. *Kedua*, adalah akibat negatif dari kelanjutan imam yang fasik pada kekuasannya. Mereka lebih condong untuk memilih akibat buruk yang lebih kecil. Apabila pemberhentian menimbulkan fitnah yang lebih besar maka tidak dibenarkan mengangkat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 190.

<sup>46</sup> *Ibid*.

senjata terhadapnya. Para ulama Ahlusunnah yang berpendapat demikian diantaranya ialah Al-Aiji, beliau mengemukakan bahwa umat harus memberhentikan imam bilamana terdapat alasan yang mengharuskan demikian, akan tetapi jika menimbulkan fitnah maka yang diambil adalah akibat buruk yang lebih kecil.<sup>47</sup>

Sedangkan Al-Kamal bin Abu Syarif mengemukakan bahwa pada dasarnya imam tidak dibenarkan diberhentikan akan tetapi berhak diberhentikan manakala kelangsungan *imamah*-nya menimbulkan fitnah.<sup>48</sup> *Kedua*, untuk memberhentikan pemimpin adalah melalui apa yang diistilahkan pada zaman modern ini dengan *civil disobedience* (pembangkangan sipil). Cara ini dilakukan apabila umat merasa bahwa imam ini fasiq yang tidak takut dosa melakukan maksiat atau zalim, tidak layak menjadi imam. Umat melalui wakil-wakil mereka menghadap kepadanya untuk memberi teguran dan nasihat akan tetapi ia menolak. Ketika itu ia merasa bahwa dirinya tercampakkan dari umat atau rakyatnya, kembali kepada kebenaran atau meletakkan jabatan.

Sebab pengertian mengingkari dengan hati tidaklah bersifat pasif tanpa memberikan reaksi konkrit terhadap pelaku kemungkaran baik penguasa maupun bukan penguasa, melainkan bersifat aktif yang berarti menolak kemungkaran dengan hatinya lalu tidak menyukainya dan tidak menyukai pelakunya serta memboikotnya, tidak makan bersamanya, tidak berhubungan dengannya dan begitu seterusnya. Apabila setiap individu umat Islam

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 191.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 45-46.

melakukan demikian terhadap imam yang zalim dan fasiq maka tidak ada jalan lain baginya selain kejatuhan yang mengenaskan.

*Ketiga*, adalah bahwa masa jabatan imam lebih baik dibatasi hingga jangka waktu tertentu. Jika imam melakukan perbuatan fasiq maka umat menghindari diri dari keburukannya dengan tidak memilihnya pada periode lain. Ini tampaknya menjadi cara yang baik untuk menghindari dari pemimpin yang fasiq dan zalim tanpa harus menumpahkan darah selain juga dapat menjadi ajang untuk menampilkan keahlian dan pengalaman yang orang-orang yang layak menjadi pemimpin umat.<sup>49</sup>

Islam menolak ketidakpedulian dan sebagai gantinya, menegaskan kewajiban umat untuk tidak mentaati dan melawan pemimpin yang tidak memenuhi hukum Tuhan. Al-Quran juga mewajibkan ketaatan kepada mereka yang berkuasa. Namun ia juga mewajibkan kepada para pemimpin memenuhi syariah dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegagalan dalam hal-hal ini akan membenarkan jabatan dari posisi kekuasaan legislatif atau majelis as-syura' dalam menjalankan kekuasaan menuntut pertanggung jawaban harus mencari bantuan dari pengadilan untuk menyelidiki masalah dengan cara yang tidak memihak dan adil.

Kepala Negara yang sudah dikategorikan tidak layak lagi menjadi seorang pemimpin, maka ia harus diberhentikan dari kekuasaannya karena dianggap telah memenuhi syarat untuk di makzulkan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam islam. Karena alasan-alasan tersebut, maka akibat

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 184-185.



yang ia dapatkan adalah dengan diberhentikan dari jabatannya atau tidak dapat menjabat lagi sebagai seorang kepala negara.

#### **D. Pandangan Para Pemikir Siyasah Tentang Pemakzulan**

##### **1. Pandangan Al-Mawardi**

Al-Mawardi adalah seorang pemikir politik Islam abad ke-5 H atau ke-11 M. Beberapa kitab politiknya telah menjadi acuan bagi masyarakat Muslim Sunni. Dengan demikian, bagi masyarakat politik tertentu, al-Mawardi bukan nama asing. Dalam kacamata pemikiran dan praktis politik, ia sangat disegani lawan maupun kawan. Tidak sebagaimana dalam pengangkatan kepala negara, dalam hal pemberhentian kepala negara al-Mawardi tidak menyuguhkan resep dan mekanisme pemberhentian atau penggantian Kepala Negara. Ia hanya berpendapat jika ternyata Kepala Negara telah menyimpang dari nilai-nilai moral agama, maka rakyat berhak untuk menyatakan mosi tidak percaya.

Secara tegas, al-Mawardi mensinyalir, seorang Kepala Negara dapat diturunkan dari kursi kekuasaannya kalau ternyata sudah keluar dari citakeadilan, hilangnya panca indera, atau organ-organ tubuh yang lain atau tidak cakap bertindak.<sup>50</sup> Alasan yang membolehkan *impeachment* (pemakzulan) imam, Khalifah, Kepala Negara itu, menurut Imam Al-Mawardi ada dua.<sup>51</sup> *Pertama*, karena ia mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (*'adalah*). Perubahan ini ada dua macam, yaitu:

---

<sup>50</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ..., h. 20.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 11.

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah, yaitu kalau ia menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan, mengumbar nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat.
- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah, yaitu kalau imam memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama, atau memutar-balikkan sejumlah pendapat untuk menghapuskan sejumlah prinsip yang sudah disepakati, maka imam bisa disingkirkan dari jabatannya.<sup>52</sup>

*Kedua*, jika terjadi perubahan dalam diri imam. Perubahan ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Di antara kekurangan yang timbul dari indra jasmani, ada dua hal penting yang menyebabkan seseorang tidak pantas lagi memegang jabatan imam, yakni hilang ingatan dan hilang penglihatan. Hilang ingatan sudah jelas dan tidak perlu dipertimbangkan. Tetapi hilang penglihatan sudah sejak lama menjadi bahan perbincangan dalam sejarah Islam. Kebiasaan yang dipakai untuk merusak mata adalah dengan besi panas, yang tujuannya adalah mencegah seseorang menduduki tahta kerajaan, sebagaimana yang sering dilakukan di lingkungan kekaisaran Byzantium. Menurut fuqaha muslim isu ini merupakan tambahan instrumen kezaliman di wilayah Timur. Diduga pengaruh dahsyat praktik kotor ini telah membutakan dua lusinan Khalifah Abbasiyah sehingga mereka turun

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h.168.

tahta. Berdasarkan hal di atas para fuqaha berpendapat bahwa seseorang yang buta tidak berhak memberikan kesaksian atau duduk sebagai hakim dalam suatu perkara, dan lebih tidak berhak lagi memimpin negara.<sup>53</sup>

b. Hilang atau cacat organ-organ tubuhnya, yang dimaksud cacat disini adalah seperti imam kehilangan dua tangan dan kakinya sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengendalikan roda pemerintahan dengan baik. Tetapi kalau cacatnya itu ringan, maka tidaklah menjadi soal. Begitu pula kalau impoten, sebab Allah pun memuji Nabi Zakaria yang impoten.

c. Hilang wibawa sehingga imam tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, ini terdiri dari dua macam:

1) Wibawa imam terkalahkan oleh asisten dan penasihatnya sehingga ia berada di ujung telunjuk nasihatnya (bawahannya). Bisa jadi, nantinya pelanggaran imam terhadap syariat pun ditutup-tutupi oleh bawahannya. Kriteria ini dikemukakan dengan maksud untuk menghindari terjadi pemberontakan (kemarahan) rakyat. Dalam keadaan seperti ini, ada dua alternatif bagi imam, yakni kalau dia tak mampu melepaskan belenggu dari telunjuk bawahannya sehingga ia menyimpang dari aturan syara', maka dia akan dipecat, tetapi kalau ia melepaskan diri dari belenggu itu, yang dalam hal ini dia boleh meminta bantuan berupa nasihat kepada orang lain, sehingga ia

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h.169.

kembali bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia boleh meneruskan jabatannya.

- 2) Jika imam tertangkap oleh musuh. Dalam keadaan demikian semua kaum muslimin wajib berusaha untuk membebaskannya. Sekalipun ia tertawan musuh, kalau masih memungkinkan memegang kekuasaan, maka ia masih tetap dipandang sebagai imam. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan untuk bebas, maka boleh dipilih orang lain untuk mewakilinya. Dan kalau sama sekali tidak ada kemungkinan bebas (karena terbunuh misalnya), maka dia dipandang lepas dari jabatannya sebagai imam dan pemilihan imam baru segera dilaksanakan.<sup>54</sup>

## 2. Pandangan Taqi al-Din al-Nabhani

Sama seperti al-Mawardi, Taqi al-Din al-Nabhani juga berpendapat, Kepala Negara dapat diberhentikan ditengah jalan atau sebelum masa jabatannya yang ditentukan berakhir. Seorang Khalifah, Kepala Negara, tegas al-Nabhani, secara otomatis akan diberhentikan manakala terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya dari jabatan khalifah. Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun menurut syara' dia tidak boleh melanjutkan jabatannya.<sup>55</sup>

Perbedaan di antara kedua keadaan ini adalah, bahwa pada keadaan yang pertama, Khalifah tidak boleh ditaati sejak terjadinya perubahan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 172.

keadaan pada dirinya. Sedangkan pada keadaan yang kedua, Khalifah harus tetap ditaati sampai dia benar-benar telah diberhentikan.<sup>56</sup> Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan dalam dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun menurut syara' tidak boleh melanjutkan jabatannya. Menurut al-Nabhani, khalifah dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terdapat satu diantara tiga hal berikut, yaitu murtad, gila atau ditawan oleh musuh yang kuat yang tidak mungkin melepaskan diri dari tawanan tersebut.

### 3. Pandangan Ibnu Taimiyah

Sementara itu, Ibnu Taimiyah selaku pemikir besar dan berpandangan luas mendukung pendapat dari Al-Kamal bin Abu Syarif yang mengemukakan bahwa pada dasarnya imam tidak dibenarkan diberhentikan akan tetapi berhak diberhentikan manakala kelangsungan *imamah*-nya menimbulkan fitnah. Ibnu Taimiyah mendukung dengan alasan bahwa menjatuhkan seorang kepala negara akan mengganggu ketentraman didalam masyarakat dan melemahkan persatuan umat.<sup>57</sup>

Karena Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan kepala negara, meskipun zalim, lebih baik bagi rakyat daripada mereka harus hidup tanpa kepala negara. Dia meminjam suatu ungkapan bahwa enam puluh tahun dibawah kepala negara yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara. Bahkan ia memberi dukungan kepada absolutisme

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h.173-174.

<sup>57</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Al-Izzah, 2002), h. 129.



yang tiada henti-hentinya. Demi ketentraman dan menjauhkan anarki ditengah masyarakat telah menjadi alasan utama untuk tidak menjatuhkan kepala negara yang melakukan penyimpangan.<sup>58</sup>

Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada Negara, sekalipun senantiasa melaksanakan kemungkaran, bertindak zalim, dan memakan hak-hak rakyat, selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kafir.<sup>59</sup>



---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Irmanputra Sidin, *Hak Retensi Presiden dan Peran MK di Masa Datang*, Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Maudidi, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Abdul Qadim Zallum, *System Pemerintahan Islam*, Jakarta: Al-Izzah, 2002.
- Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Donald L. Horowitz, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, terj. Daryatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Farid Abdul Khaliq, *Fi As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Booklet tentang Sejarah Pembentukan, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Mas Marwan, *Merefleksi Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press Kelompok Penerbit In-Trans, 2012.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004.
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia edisi 3* Bandung: Refika Aditama, 2003.

## **B. Undang-Undang**

Pasal 5 sampai dengan pasal 12A UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001

Pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001

Pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Setelah Amandemen Ketiga, bab III, pasal 7B, ayat 1-7.

